

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kesejahteraan

1. Pengertian dan Fungsi Kesejahteraan

Kesejahteraan mempunyai arti aman sentosa, makmur atau selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya). Dalam ilmu ekonomi modern, kesejahteraan ekonomi kira-kira dapat didefinisikan sebagai bagian kesejahteraan yang dapat dikaitkan dengan alat pengukur uang.¹ Kesejahteraan ekonomi dapat dimaksimalkan kalau sumber-sumber daya ekonomi dialokasikan secara optimal.

Konsep kesejahteraan ekonomi Islam terdiri dari bertambahnya pendapatan yang diakibatkan oleh meningkatnya produksi dari barang-barang yang berfaedah melalui pemanfaatan sumber-sumber daya secara maksimum, baik manusia maupun benda, demikian juga melalui ikut sertanya jumlah maksimum orang dalam proses produksi.

Kesejahteraan merupakan tersedianya barang dan jasa vital seperti beras, air minum listrik, perumahan, alat transport dan barang dan jasa lain yang dibutuhkan dengan harga murah, serta tersedianya dana untuk pinjaman dengan bunga yang sangat rendah.² Selain itu juga fasilitas-

¹M. Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1997), 54.

²Tim Dosen IKS UMM, *Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Kesejahteraan Sosial* (Malang: UMM Press, 2007), 116

fasilitas untuk kepentingan-kepentingan dan keamanan seperti alat pemadam kebakaran, senjata dan sebagainya.³

Dalam Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945, kata “kesejahteraan” tersebut dirumuskan dengan istilah “masyarakat yang adil dan makmur”. Itulah tujuan dari berdirinya sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam memenuhi hak setiap bangsa untuk memperoleh kemerdekaan guna untuk mewujudkan perdamaian dunia yang abadi dan meningkatkan kecerdasan bangsa guna mencapai tujuan adil dan makmur.⁴

Kesejahteraan memang identik dengan sesuatu kebutuhan yang sifatnya menyangkut kehidupan orang banyak. Akan tetapi sesuatu yang menyangkut kehidupan orang banyak ini merupakan sesuatu yang mudah terwujud jika sesuatu yang menyangkut individu-individu telah dipenuhi terlebih dahulu. Kesejahteraan individu dianggap sebagai fungsi yang kian meningkat dari komoditi dan jasa yang menurut skala nilainya, ingin dimilikinya.⁵

Kesejahteraan merupakan terpenuhinya semua kebutuhan yang berkaitan dengan sandang, pangan dan papan. Sandang merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan badan manusia yakni berupa pakaian yang layak. Pangan merupakan kebutuhan yang berkaitan tubuh manusia

³Ibnu Sukotjo, *Pengantar bisnis Modern* (Jakarta: Alfabeta, 2006), 12

⁴Abdur Rahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi* (Jakarta: Desantara Utama, 2006), 176-177

⁵*Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), 46

berupa makanan. Sedangkan papan merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan perlindungan manusia berupa tempat tinggal yang layak.

Kesejahteraan mempunyai lima fungsi pokok yaitu:⁶

- a. Perbaikan secara progresif dari pada kondisi-kondisi kehidupan orang.
- b. Pengembangan sumber daya manusia.
- c. Berorientasi orang terhadap perubahan sosial dan penyesuaian diri.
- d. Penggerakan dan penciptaan sumber-sumber komunitas untuk tujuan-tujuan pembangunan.
- e. Penyediaan struktur-struktur intitusional untuk berfungsinya pelayanan-pelayanan yang teroganisir lainnya.

2. Unsur-unsur dan Komponen Kesejahteraan.

Pada awalnya kesejahteraan sosial didefinisikan suatu keadaan sejahtera secara sosial yang tersusun dari tiga unsur sebagai berikut: pertama, setinggi apa masalah-masalah sosial dikendalikan. Kedua, seluas apa kebutuhan-kebutuhan dipenuhi. Ketiga, setinggi apa kesempatan-kesempatan.⁷

Kesejahteraan yang didambakan oleh umat Islam dapat terwujud melalui terciptanya unsur-unsur sebagai berikut:⁸

- a. Anggota keluarga semua menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dalam arti bahwa ayah, ibu dan anak semuanya berkualitas.

⁶Tim Dosen IKS UMM, *Beberapa Pemikiran*, 116

⁷Ibid

⁸M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Bermasyarakat* (Bandung: Mizan, 1994), 292.

- b. Kecukupan dalam bidang material yang diperoleh dengan cara yang tidak terlalu memberatkan jasmani dan rohani. Kemampuan tersebut berarti kesanggupan untuk membiayai kehidupan rumah tangga, kesehatan serta pendidikan untuk seluruh anggotanya.

Ada enam komponen yang tercakup dalam kesejahteraan sosial yaitu:⁹

- a. Kesehatan.
- b. Pendidikan.
- c. Perumahan.
- d. Pelayanan kerja.
- e. Pemeliharaan penghasilan (*Income maintenance*) yang meliputi asuransi sosial dan bantuan sosial.
- f. Pelayanan sosial personal.

Kesejahteraan merupakan sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap manusia. Kesejahteraan tidaklah harus dirasakan oleh golongan kaya, akan tetapi kesejahteraan juga harus dirasakan oleh golongan miskin. Oleh karena itu kesejahteraan merupakan sesuatu yang tidak mengenal struktur kemasyarakatan. Siapapun dan dari golongan apapun orang tersebut, harus mendapatkan dan merasakan kesejahteraan

Aspek-aspek kesejahteraan ekonomi yang akan dibangun perlu mencakup: ketahanan pangan, kesehatan, sandang, kerja dan usaha, perumahan dan pendidikan. Urutan tersebut diperkirakan merupakan

⁹Tim Dosen IKS UMM. *Beberapa Pemikiran*, 106-107

urutan kepekaan masyarakat terhadap krisis. Artinya, jika krisis melanda maka yang pertama kali akan dikorbankan adalah pendidikan, dan jika telah mencapai krisis pangan maka kondisi yang terjadi sudah merupakan bencana yang sangat serius, tetapi ditinjau dari sudut pandang pemerintah, layanan harus diprioritaskan kepada aspek pendidikan, kesehatan, pangan, serta kerja dan usaha.¹⁰ Uraian aspek-aspek kesejahteraan di atas sebagaimana uraian berikut :

a. Pangan.

Ketahanan pangan dapat diamati dari 3 (tiga) dimensi, yaitu: a) Dimensi sasaran nasional; b) Dimensi waktu atau musim; dan c) Dimensi social ekonomi pangan.¹¹ Pencapaian ketahanan pangan dapat terlihat dari ketersediaan pangan, produksi pangan, konsumsi pangan, konsumsi gizi, dan status gizi.

Usaha untuk mewujudkan ketahanan pangan sampai tingkat rumah tangga dapat ditempuh melalui peningkatan keefektifan dan efisiensi distribusi pangan, peningkatan daya beli masyarakat, peningkatan kemampuan penyediaan pangan, peningkatan pembentukan cadangan pangan, dan peningkatan pengetahuan pangan dan gizi

Berdasarkan kesepakatan *World Food Summit*, ketahanan pangan adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan anggota rumah

¹⁰Departemen Sosial RI. *Petunjuk Pelaksanaan Program Kesejahteraan ekonomi Melalui Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) Bagi Pekerja Mandiri di Sektor Informal*. (Jakarta: 2005), 14

¹¹Ibid., 24

tangga dalam jumlah, mutu, dan ragam sesuai budaya setempat dari waktu ke waktu agar hidup sehat dan produktif.¹²

Definisi ketahanan pangan rumah tangga yang digunakan di Indonesia belum mensosialisasikan kesepakatan internasional tersebut, karena definisi formal ketahanan pangan yang digunakan terbatas pada kondisi tersedianya pangan yang cukup, bermutu, dan aman di rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam UU No. 7/1996.

Jika pangan merupakan kebutuhan dasar (*basic needs*) suatu rumah tangga atau masyarakat, maka ketahanan pangan menjadi aspek yang paling utama dalam sistem keterjaminan sosial.

b. Kesehatan.

Kesehatan setiap anggota keluarga merupakan syarat mutlak untuk dapat bekerja produktif, menghasilkan pendapatan yang akan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup lainnya.

Meskipun ketahanan pangan keluarga akan menentukan kesehatan anggota keluarga, tetapi kesehatan anggota keluarga juga dapat ditentukan oleh faktor-faktor nonpangan, seperti infeksi patogen, pelayanan kesehatan dan perubahan lingkungan.

Oleh karena itu, keterjaminan kesehatan merupakan salah satu aspek dalam keterjaminan sosial. Upaya minimal untuk bertahan hidup adalah bebas dari penyakit serius. Hal ini seringkali tidak dapat dipenuhi oleh anggota keluarga. Berdasarkan pertimbangan ini, aspek kesehatan

¹² Ibid., 27

dalam kesejahteraan ekonomimenunjukkan kemampuan keluarga untuk mengakses pelayanan kesehatan bagi setiap anggota keluarga yang mengalami gangguan kesehatan serius.

c. Sandang dan Perumahan.

Pakaian dan perumahan merupakan kebutuhan untuk meminimalkan resiko perubahan lingkungan yang akan berdampak pada gangguan kesehatan. Disamping itu, pakaian dan perumahan juga merupakan wahana untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan sosial-psikologis keluarga dan anggotanya.¹³

Berdasarkan hal tersebut, pemilihan pakaian secara kuantitas maupun kualitas dapat dijadikan sebagai indikator keterjaminan sandang. Demikian pula halnya dengan perumahan. Kualitas dan luas lantai rumah yang dimiliki dapat dijadikan sebagai indikator pemenuhan kebutuhan papan atau perumahan dalam konteks keterjaminan sosial.

d. Usaha dan Kerja.

Kerja merupakan sumber utama pendapatan masyarakat. Namun, kerja seringkali merupakan basis eksistensi seseorang atau suatu keluarga. Sebagaimana ditunjukkan oleh kondisi krisis, kehilangan pekerjaan merupakan pukulan pertama yang memicu bentuk ketidaksejahteraan lain. Pecantuman keterjaminan kerja dan usaha sebagai aspek kesejahteraan ekonomidan bukan pendapatan merupakan usaha untuk memberikan jaminan keberlanjutan yang lebih baik, juga untuk mengoreksi

¹³Pusat Kajian Administrasi Internasional. *Kajian Analisis Kebijakan Sistem Kesejahteraan ekonomi Menuju Masyarakat Mandiri* (Jakarta: LAN, 2006), 5

kemungkinan masalah daya beli, aksesibilitas yang tertutup, ketiadaan kebutuhan, serta mengurangi pelaksanaan yang manipulatif.

Aspek keterjaminan kerja dan usaha dapat diartikan sebagai kemampuan masyarakat untuk terus menjaga ketersediaan lapangan pekerjaan dan memberikan kesempatan berusaha bagi anggota masyarakat dalam berbagai kondisi dan melalui mekanisme sosial tertentu. Hal ini melahirkan banyak konsekuensi kebijakan, mulai dari tingkat makro (nasional) hingga ke tingkat rumah tangga.

Beberapa di antaranya adalah: a) Promosi kegiatan ekonomi yang berbasis pada sumber daya lokal dan pasar lokal; b) Mengembangkan berbagai pengubah ekonomi (nilai tukar, tingkat bunga, anggaran pemerintah, pajak, dan lain-lain), yang bersahabat dengan pengembangan kegiatan ekonomi sebagian besar rakyat; c) Membiasakan tabungan dan cadangan mulai dari tingkat nasional, daerah, desa, hingga rumah tangga; dan d) Membudayakan kebiasaan berusaha secara baik melalui pengenalan sumber daya yang dimiliki dan prospek jenis.¹⁴

3. Syarat-syarat Peningkatan Kesejahteraan

Dua pokok suatu kenaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah: *Pertama*, perbaikan dalam produksi; dan *kedua*, perbaikan dalam distribusi yang dihasilkan.¹⁵

a. Perbaikan dalam produksi berubah sendiri menjadi; 1) meningkatnya daya produksi sehingga hasil dari tiap pekerja yang lebih besar akan di

¹⁴ Ibid., 7

¹⁵ Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, 268.

peroleh dengan daya upaya lebih kecil;2)Perbaikan dalam organisasi produksi menghindari pengangguran dan sebab-sebab lain sehingga dapat mengurangi pemborosan sumber daya ekonomi sekecil-kecilnya..3)perbaikan dalam susunan atau pola produksi sehingga dapat melayani kebutuhan masyarakat.

- b. Perbaikan dalam distribusi berubah menjadi;1)pengurangan perbedaan dalam pendapatan berbagai individu dan keluarga yang berlainan,yang biasa terdapat pada kebanyakan komunitas yang beradab.2)pengurangan fluktuasi antara periode waktu yang berbeda-beda dalam pendapatan individu dan keluarga tertentu,terutama dikalangan masyarakat yang lebih miskin.

4. Teori-teori Kesejahteraan Ekonomi

Perkembangan kesejahteraan ekonomi menjadi sebuah bidang ilmu juga tidak dapat dilepaskan dari wacana mengenai peran negara dalam pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi. Karenanya, kesejahteraan ekonomi sangat terkait dengan tiga ideologi 'besar' (*grand ideology*) atau mazhab pemikiran yang berkembang di Amerika Serikat dan Eropa Barat, yaitu: liberalisme, konservatisme dan strukturalisme.¹⁶

Ketiga ideologi ini memiliki pandangan berlainan tentang bagaimana seharusnya negara berperan dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang kemudian melahirkan sistem 'negarakesejahteraan' (*welfare*

¹⁶Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*: (Bandung: Refika Aditama, 2006), 21

state) dan mempengaruhi perkembangan paradigma kesejahteraan ekonomi dan pendekatan pekerjaan sosial.

Berikut penulis uraikan tentang teori-teori kesejahteraan ekonomi menurut madzhab pemikiran besar dunia.

a. Liberalisme

Kaum liberal mendukung *welfare state*. Negara merefleksikan kehendak individu dan dipilih berdasarkan perwakilan kelompok. Negara memiliki legitimasi untuk mengatur dan bertindak.

Tiga intervensi negara yang diperlukan dalam pembangunan mencakup: (a) penciptaan distribusi pendapatan, (b) stabilisasi mekanisme pasar swasta, dan (c) penyediaan barang-barang publik (*public goods*) yang tidak mampu atau tidak efisien disediakan oleh pasar.¹⁷

Dalam bukunya yang berjudul *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Edi Suharto menjelaskan:

Individu dan kelompok adalah warga Negara yang sehat, namun punya potensi menjadi rentan (*vulnerable*) dan bermasalah dikarenakan adanya kesalahan sistem atau lingkungan. "*Blaming the system*" adalah pandangan utama ideologi ini. Masalah ekonomi, termasuk orang yang mengalaminya, diakibatkan bukan oleh kesalahan individu yang bersangkutan, melainkan oleh kesalahan sistem.¹⁸

Jadi kesejahteraan ekonomi berporos pada paradigma institusional-universal yang meyakini bahwa masalah sosial hanya

¹⁷Ibid., 25

¹⁸Ibid., 27

bisa dipecahkan dengan program pelayanan sosial yang melembaga, berkelanjutan, dan mencakup semua warga.

Pendekatan pekerjaan ekonomi menekankan pentingnya aspek pencegahan dan pengembangan kesempatan yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Program-program pengembangan masyarakat (*community development*), termasuk *community empowerment*, *capacity building* dan *social entrepreneurship* dianggap paling ampuh dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

b. Konservatisme

Mazhab konservatisme adalah penentang *welfare state*. Sistem politik pada hakekatnya bersifat fungsional dan karenanya akan lebih baik jika dibiarkan berjalan sendiri. Masalah ekonomi terjadi bukan karena kesalahan sistem, melainkan kesalahan individu yang bersangkutan. Misalnya, karena malas, tidak memiliki jiwa wirausaha dan karakteristik budaya kemiskinan lainnya.

Solusi yang diajukan oleh para penganut "*blaming the victim*" ini pada intinya membatasi peran pemerintah dan menekankan perubahan pada individu dan kelompok-kelompok kecil. Paradigma kesejahteraan ekonomi berpijak pada pandangan dengan residual-selektifitas.

Pelayanan sosial hanya perlu diberikan kepada kelompok lemah secara temporer manakala lembaga pasar dan keluarga tidak

berfungsi. Pendekatan pekerjaan sosial lebih menitikberatkan pada pelayanan langsung dan rehabilitasi sosial-klinis untuk membantu orang agar dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya.¹⁹

c. Strukturalisme

Kaum struktural memandang masalah ekonomi sebagai akibat adanya ketimpangan pada sistem atau struktur sosial masyarakat. Masalah ekonomi adalah situasi tidak terhindarkan dan akan selalu ada dalam sistem yang *classist*, *sexist* dan *racist*, karena sistem seperti itu menciptakan ketidakadilan melalui perbedaan-perbedaan status sosial.²⁰

Keadaan ini akan semakin membesar dan memburuk dalam sebuah sistem ekonomi kapitalis. Rakyat adalah korban dan objek eksploitasi orang-orang yang memiliki kekuasaan dan privilege. Solusinya: rakyat harus berjuang memperoleh kekuasaan dan menjangkau sumber-sumber. Sistem ekonomi, sosial dan politik harus diubah dan direstrukturisasi secara menyeluruh.

Para penganut mazhab strukturalisme memiliki kesamaan pandangan dengan kaum liberal. Mereka menganut faham "*blaming the system*" atau lebih tepatnya "*blaming the structure*" serta paradigma kesejahteraan sosial yang bersandar pada model institusional-radikal.

¹⁹Ibid.,31

²⁰Ibid.,35

Yang membedakannya dengan kaum liberalis adalah bahwa pendekatan pekerjaan sosial yang dikembangkan oleh kelompok strukturalis lebih memfokuskan pada perubahan lingkungan pada aras makro. Analisis kebijakan sosial, advokasi kelas dan aksi-aksi sosial dan politik adalah beberapa metoda yang sering digunakan untuk melakukan perubahan sosial secara struktural dan radikal.

Skema perlindungan sosial, seperti *social security*, *welfare-to-work programmes*, *social safety nets*, dan *conditional cash transfer* adalah beberapa program yang umumnya diterapkan oleh mazhab ini.²¹

d. Neo liberalisme

Teori neo-liberal berakar pada karya politik klasik yang ditulis oleh Thomas Hobbes, John Lock dan John Stuart Mill yang intinya menyerukan bahwa komponen penting dari sebuah masyarakat adalah kebebasan individu.

Dalam bidang ekonomi, karya monumental Adam Smith, *the Wealth of Nation* (1776), dan Frederick Hayek, *The Road to Serfdom* (1944), dipandang sebagai rujukan kaum neoliberal yang mengedepankan azas *laissez faire*, yang oleh Cheyne, O'Brien dan Belgrave (1998:72) disebut sebagai ide yang mengusulkan "*the almost complete absence of state's intervention in the economy.*" Secara garis besar, para pendukung neo-liberal berargumen bahwa kesejahteraan ekonomi harus disediakan oleh kelompok-kelompok swadaya, lembaga-lembaga keagamaan atau oleh keluarga. Peran negara hanyalah sebagai "agen residual" atau "penjaga malam"

²¹Ibid.,13

yang baru boleh ikut campur manakala lembaga-lembaga di atas tidak mampu lagi menjalankan tugasnya.²²

Meskipun secara teoretis kaum neo-liberal menolak tanggung jawab Negara dalam usaha kesejahteraan sosial, dalam praktiknya mereka hanya mengusulkan penyesuaian kembali program-program kesejahteraan sosial, ketimbang menghapuskannya sama sekali.

Berpijak pada *public-choice theory*, *agency theory*, dan *transaction-cost theory*, mereka pada intinya ingin mengganti pengaruh para politisi dan kelompok-kelompok kepentingan dalam pembuatan kebijakan, dengan keputusan-keputusan yang berdasarkan kepentingan konsumen sejalan dengan prinsip ekonomi pasar bebas. Penerapan program-program *structuraladjustment* di beberapa negara merupakan contoh kongkrit dari pengaruh neoliberal dalam bidang kesejahteraan sosial ini.

Keyakinan yang berlebihan terhadap keunggulan mekanisme pasar yang secara alamiah dianggap mampu mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan sosial mendapat kritik dari kaum demokrat sosial.

Berpijak pada analisis Karl Marx dan Frederick Engels, pendukung demokrat sosial menyatakan bahwa "*a free market did not lead to greater social wealth, but to greater poverty and exploitation... a society is just when people's needs are met, and when*

²²<http://www.mail-archive.com/ekonomi-nasional@yahoogroups.com/info.html>, Menuju Masyarakat Mandiri: Pengembangan Model Sistem Kesejahteraan Menuju Masyarakat Mandiri: Pengembangan Model Sistem Kesejahteraan Menuju Masyarakat Mandiri (Terjemahan). Diakses tanggal 12 Februari 2011.

inequality and exploitation in economic and social relations are eliminated".²³

Teori ini berporos pada prinsip-prinsip ekonomi campuran (*mixed economy*) dan majemen ekonomi Keynesian. Teori ini muncul sebagai jawaban terhadap depresi ekonomi yang terjadi pada tahun 1920-an dan awal 1930-an. Sistem negara kesejahteraan yang menekankan pentingnya manajemen dan pendanaan negara dalam pemberian pelayanan sosial dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan dan jaminan sosial, sangat dipengaruhi oleh pendekatan "ekonomi manajemen-permintaan" (*demand-management economics*) gaya Keynesian ini.

Meskipun tidak setuju sepenuhnya terhadap sistem pasar bebas, kaum demokrat sosial tidak memandang sistem ekonomi kapitalis sebagai evil. Bahkan kapitalis masih dipandang sebagai bentuk pengorganisasian ekonomi yang paling efektif. Hanya saja, kapitalisme perlu dilengkapi dengan sistem negara kesejahteraan agar lebih berwajah manusiawi. "*The welfare state acts as the human face of capitalism*," demikian menurut Cheyne, O'Brien dan Belgrave.²⁴

Dari beberapa teori kesejahteraan ekonomi yang telah penulis uraikan di atas dapat diketahui bahwa dalam penulisan skripsi ini penulis lebih sepakat dengan teori konservatisme, karena dalam teori konservatisme dijelaskan bahwa masalah ekonomi terjadi bukan karena kesalahan sistem, melainkan kesalahan individu yang

²³Edi Suharto, *Membangun Masyarakat ...*, 14

²⁴Ibid., 17

bersangkutan. Misalnya, karena malas, tidak memiliki jiwa wirausaha dan karakteristik budaya kemiskinan lainnya.

Dalam hal usaha genteng diharapkan dapat bekerja dengan semaksimal mungkin, karena hasil yang diharapkan adalah output dari kerja kerasnya, agar mendapat hasil yang maksimal pengusaha genteng diukur dari pekerjaan yang dilakukannya, semakin sedikit menggantungkan pekerjaan pada orang lain maka akan semakin besar keuntungan yang didapat. Inilah yang menjadi titik temu dari teori konservatisme dengan kesejahteraan masyarakat petani jati yaitu semakin individu bekerja dengan maksimal (menghilangkan malas) maka akan semakin tinggi hasil yang didapat.

Di sisi lain teori konservatisme juga menekankan pada aspek kesetaraan, karena Negara tidak berhak mendominasi sumberdaya masyarakat, sehingga individu dituntut untuk mampu mengeksplorasi sumber daya alam dan manusia yang ada. Hal ini merupakan prasyarat penting dalam memperoleh kemandirian dan kebebasan dalam memenuhi kebutuhan hidup tiap-tiap warga masyarakat. Pencapaian kebebasan hanya dimungkinkan jika setiap orang memiliki atau mampu menjangkau sumber-sumber, seperti pendidikan, kesehatan yang baik dan pendapatan yang cukup. Kebebasan lebih dari sekedar bebas dari pengaruh luar; melainkan pula bebas dalam menentukan pilihan-pilihan (*choices*).

Dengan kata lain kebebasan berarti memiliki kemampuan (*capabilities*) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Misalnya,

kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya, kemampuan menghindari kematian dini, kemampuan menghindari kekurangan gizi, kemampuan membaca, menulis dan berkomunikasi. Negara karenanya memiliki peranan dalam menjamin bahwa setiap orang dapat berpartisipasi dalam transaksi-transaksi kemasyarakatan yang memungkinkan mereka menentukan pilihan-pilihannya dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Dengan demikian dalam meningkatkan kebebasan ternyata dapat menyediakan penghasilan dasar dengan mana orang akan memiliki kemampuan (*capabilities*) untuk memenuhi kebutuhan dan menentukan pilihan-pilihannya (*choices*). Sebaliknya, ketiadaan kesejahteraan ekonomidasar dapat menyebabkan ketergantungan (*dependency*) karena dapat membuat orang tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dan menentukan pilihan-pilihannya.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan kesejahteraan ekonomi adalah kemampuan masyarakat secara mandiri untuk terus berkembang serta mewaspada, mencegah, dan mengatasi terjadinya krisis, yang bersumber dari faktor internal maupun faktor eksternal, sehingga dapat terwujud suatu kesejahteraan sosial yang adil.

Dalam pengertian tersebut, beberapa hal perlu mendapat perhatian, yaitu:

a. Pengertian dan ruang lingkup masyarakat.

Seringkali, wacana pembicaraan mengenai kesejahteraan masyarakat menempatkan masyarakat sebagai pihak yang berbeda

dengan pemerintah, bahkan sering berbeda dengan pengusaha swastabesar.

Jika dilihat dari perspektif kemanusiaan seperti di atas, yang dimaksud dengan masyarakat adalah manusia-manusia yang terhimpun berdasarkan suatu alasan, seperti organisatoris, geografis, kelembagaan, dan hal lainnya.

Perbedaan posisi atau status hanya merupakan bentuk diferensiasi peran dan fungsi dalam satu kesatuan masyarakat yang utuh. Oleh sebab itu, pengertian masyarakat (*community*) dapat pula diartikan sebagai rakyat (*people*), lebih dari *citizen*, yang mencakup unsur-unsur penduduk, pemerintah, pengusaha, NGO, dan sebagainya. Kemudian, sistem pemerintahannya disebut *governance*.

b. Pengertian mandiri.

Mandiri atau kemandirian seringkali diterjemahkan sebagai kemampuan sendiri, artinya menggunakan sumber daya sendiri, kerja sendiri, dan dalam lingkungan yang diciptakan sendiri (tertutup). Pada masa lalu, hal ini mungkin memiliki pendukung yang cukup kuat. Namun, dalam lingkungan serba global dan terbuka, hal tersebut tidak dapat lagi dipertahankan.

Oleh sebab itu, pengertian "secara mandiri" diartikan sebagai kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri dalam mendayagunakan seluruh sumber daya yang memungkinkan, termasuk bantuan luar untuk mencapai tujuan. Hal ini sesuai dengan

kecenderungan dunia saat ini, yaitu perubahan dari *global dependence* menjadi *local interdependence* atau lebih kecil lagi *individual interdependence* yang identik dengan *relationship* (keterhubungan).

- c. Pengertian mewaspadaai, mencegah, dan mengatasi.

Hal ini memiliki dimensi dinamis dan antisipatif. Hanya dengan kemampuan mewaspadaai, kejadian buruk atau krisis yang akan terjadi dapat dicegah atau diminimalkan resikonya. Kalaupun kejadian buruk ini terjadi juga karena faktor bencana atau malapetaka, masyarakat secara mandiri masih bisa meminimalkan resiko. Dengan demikian, mereka juga memiliki pengertian sebagai suatu proses yang berkesinambungan dan berkelanjutan (*continuous process*).

- d. Pengertian "krisis" itu sendiri.

Dalam batasan ini, yang dimaksud dengan krisis adalah segala sesuatu yang mengganggu dan merusak banyak sendi masyarakat dalam luasan lingkup dan waktu yang sangat substansial sehingga membahayakan dan menjauhkan masyarakat dari pencapaian tujuan kesejahteraan

- e. Pengertian kesejahteraan yang adil.

Yaitu kesejahteraan yang diperoleh tanpa eksploitasi terhadap salah satu anggota, atau salah satu bagian masyarakat, atau masyarakat itu sendiri secara keseluruhan, dan imbalan (*reward*)

kesejahteraan yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan. Dalam konteks ini, hubungan manusia lebih bersifat *substantive-functional*.

Berdasarkan pengertian kesejahteraan ekonomi di atas, maka yang dimaksud dengan sistem kesejahteraan ekonomi adalah rangkaian komponen terkait yang sinergis untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi di suatu wilayah. Batasan mengenai sistem kesejahteraan ekonomi (SKE) ini kemudian membatasi lingkup kesejahteraan ekonomi itu sendiri, yaitu:

a. Pemberdayaan Keluarga.

Sistem kesejahteraan ekonomi dalam suatu wilayah masyarakat ditentukan oleh proses pemberdayaan keluarga sebagai unit sosial dan kekerabatan paling kecil dalam masyarakat. Bila keluarga mampu mewujudkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan, maka kesejahteraan ekonomi akan lebih mudah diwujudkan.

b. Pemberdayaan Wilayah Komunitas.

Kesejahteraan ekonomi melingkupi pemberdayaan wilayah, dalam arti sistem kesejahteraan ekonomi dibangun mulai dari ketahanan wilayah komunitas masyarakat terkecil yang memungkinkan dilakukannya perencanaan dan pengambilan keputusan bagi pengembangan sistem keterjaminan sosial.

Lingkup terkecil yang dipandang paling tepat adalah tingkat desa, mukim, atau – dalam beberapa kondisi tertentu – dusun atau

kekerabatan adat yang setara. Dengan demikian, kesejahteraan ekonomi tingkat nasional dibangun atas kesejahteraan ekonomi masing-masing daerah dengan memperhatikan karakteristik masing-masing daerah.

c. Pemberdayaan Energi Sosial Kreatif

Energi sosial adalah kemampuan masyarakat secara bersama-sama memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia. Energi ini merupakan kekuatan pokok yang memungkinkan tumbuhnya sistem yang berkedaulatan rakyat. Sistem kesejahteraan ekonomi dibangun dan dilaksanakan dengan memberdayakan energi sosial kreatif yang ada dalam masyarakat. Sejalan dengan lingkup ketahanan wilayah komunitas dan pengertian kemandirian maka basis utama pengembangan SKS bertumpu pada energi sosial masyarakat sendiri.²⁵

Kalaupun diperlukan dukungan eksternal, dukungan tersebut merupakan pembukaan dan kemudahan aksesibilitas masyarakat pada sumber daya dan cara penggunaannya. Dukungan lain adalah proses penyadaran dan pemberian pengetahuan mengenai kemampuan yang sebenarnya dimiliki masyarakat untuk mampu mengatasi masalahnya sendiri.

Mengacu pada batasan energi sosial bersumber pada 3 (tiga) unsur yang saling terkait, yaitu: i) *Gagasan (ideas)* adalah hasil pikiran progresif yang tampil dan diterima bersama. Gagasan dapat datang dari

²⁵Departemen Sosial RI. *Petunjuk Pelaksanaan*, 1

dalam atau dari luar satuan sosial; dari dalam atau dari luar kelompok masyarakat.²⁶

Biasanya, gagasan semacam ini diterima oleh masyarakat karena dinilai bermanfaat bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup warga masyarakat. Gagasan semacam itu bisa berubah sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, sehingga senantiasa mengandung nilai manfaat yang nyata dan akan dapat menjadi acuan pola pikir dan pola tindak masyarakat dalam kehidupan sosial; ii) *Idaman (ideal)* adalah harapan atau kepentingan bersama yaitu wujud kesejahteraan bersama sebagai buah realisasi gagasan (*ideals*). Dalam hal ini, berlaku norma dasar : “berbuat bagi orang lain sebagaimana orang lain berbuat bagimu.” Idaman ini dapat menjadi semacam idealisme dari masyarakat yang bersangkutan, sehingga dalam diri setiap warga masyarakat ada dorongan atau motivasi untuk mewujudkannya; dan iii) *Persaudaraan (friendship)* merupakan wujud solidaritas dalam suatu satuan sosial sebagai daya utama dalam proses mencapai idaman yang telah dikukuhkan..²⁷

Solidaritas muncul secara melembaga dalam kelembagaan lokal karena berbasis pada kesamaan dan kesepakatan atas harapan atau kepentingan (*ideals*) yang disadari dan dimiliki bersama, serta ingin diwujudkan dalam sistem sosial tertentu. Keberadaan ketiga unsur energi social tersebut menjadi dasar terjadinya kerjasama saling tolong

²⁶Ibid, 3

²⁷Pusat Kajian Administrasi Internasional. *Kajian Analisis*, 3

menolong, dan berkembangnya kepedulian sosial dalam suatu konteks keterjaminan sosial.

d. Pemberdayaan Kelembagaan Lokal.

Konsisten dengan pemikiran di atas, maka dengan memanfaatkan kelembagaan lokal yang sudah ada. Pembentukan lembaga baru bukan merupakan prioritas pengembangan. Lembaga baru akan dibangun jika masyarakat sendiri yang membentuknya dan lembaga lama tidak mampu lagi menjalankan fungsi yang dibutuhkan dalam pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Salah satu aspek penting yang perlu dilakukan oleh dan dengan pemberdayaan kelembagaan lokal adalah menentukan atau mengevaluasi kemiskinan (*poverty assessments*).

Pelaksanaan *poverty assessments* membutuhkan waktu yang lebih lama dan juga membutuhkan sumber daya yang lebih banyak. Namun, hasil yang diperoleh bisa sangat menentukan keberhasilan seluruh sistem kesejahteraan ekonomi itu sendiri. Pelibatan kelembagaan lokal dalam arti organisasi, norma, tata aturan, hingga individu lokal akan memberikan manfaat:

- (a) *Consistency*, peningkatan pemahaman terhadap dinamika aspek-aspek kultural, sosial, ekonomi, dan politik yang berkaitan dengan aspek-aspek kesejahteraan ekonomi itu sendiri;
- (b) *Reality*, menjamin bahwa strategi pengembangan yang akan dilakukan benar-benar merefleksikan kondisi nyata dalam masyarakat, realistis, dan dapat dilakukan oleh masyarakat itu sendiri;
- (c) *Sustainability*, mendorong tumbuhnya rasa memiliki sehingga lahir tanggung jawab untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan sistem; dan
- (d)

Stimulation, membangun kapasitas sosial untuk mengembangkan program yang mungkin pada awalnya dibangun atas bantuan dari luar.²⁸

5. Kesejahteraan Menurut Islam

Kesejahteraan ekonomi dalam Islam merupakan hasil dari konsep perekonomian berakidah tauhid dengan segala elemen-elemennya: keimanan, pengabdian, interaksi sesama manusia dengan alam. Islam dengan segala ajaran dan hukum-hukumnya membentuk suatu pedoman dalam berbisnis dan usaha.

Jadi jelas letak nilai-nilai yang dianjurkan oleh Islam dalam melakukan segala usaha adalah menekankan kejujuran, keadilan, dan kemandirian.

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk selalu berusaha dalam mempeoleh kehidupan di dunia yang sebaik-baiknya. Dalam surat Al-Qoshosh ayat 77 Allah berfirman:

أَحْسِنِ الدُّنْيَا مِنْ نَصِيبِكَ تَنْسَ وَلَا الْأَخْرَةَ الدَّارَ اللَّهُ أَيْنَكَ فِيمَا وَابْتَغِ
الْمُفْسِدِينَ تُحِبُّ لَا اللَّهُ إِنَّ الْأَرْضَ فِي الْفَسَادِ تَبْتَغِ وَلَا إِلَيْكَ اللَّهُ أَحْسَنَ كَمَا وَ

(القصص : ٧٧)

Terjemah: "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak

²⁸ Ibid

menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan". (QS: Al-Qashash : 77).²⁹

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah menganjurkan bahkan mewajibkan umat Islam untuk berusaha mencapai kenikmatan dunia disamping kenikmatan akhirat. Dengan kata lain umat manusia dilarang untuk bermalas-malasan dan melupakan urusan duniawi (mencari rizqi), akan tetapi rizqi wajib dicari dengan cara yang sebaik-baiknya tanpa berbuat kerusakan, baik kerusakan secara vertical (hubungannya dengan Allah), maupun secara horizontal (dengan sesama manusia dan alam).

Dalam ayat lain Allah menganjurkan umat Islam untuk, bersama-sama ingin mewujudkan keadilan dan pemerataan, kesejahteraan sosial ekonomi. Dalam surat At-Taubah ayat 60 Allah berfirman:

وَفِي قُلُوبِهِمْ وَالْمَوْلُفَةِ عَلَيْهَا وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ وَالْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا
يَمْرَعِلِيمُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنَ فَرِيضَةِ السَّبِيلِ وَأَبْنِ اللَّهِ سَبِيلٍ وَفِي وَالْغَرَمِينَ الرِّقَابِ
حَك

Terjemah: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. At-taubah: 60).³⁰

²⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Gemarisalah Press, 1989), 623

³⁰Ibid, 288

Dari ayat di di atas, secara eksplisit Allah menyuruh umatnya untuk hidup sejahtera, di samping itu Islam juga mengajarkan umatnya untuk bergotong royong dalam membangun ekonomi, dengan kata lain Islam mewajibkan umatnya untuk saling bekerja sama dalam membangun ekonomi bersama.

B. Usaha Mikro

1. Pengertian Usaha Mikro

Usaha mikro mempunyai arti yaitu satu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian.³¹

Sedangkan menurut pengertian lain tentang mikro ekonomi adalah cabang dari yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang, dan jasa yang diperjualbelikan. Ekonomi mikro meneliti bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut mempengaruhi atas barang dan jasa, yang akan menentukan harga; dan bagaimana harga, pada gilirannya, menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa selanjutnya. Individu yang melakukan kombinasi konsumsi atau produksi secara optimal, bersama-sama individu lainnya di pasar, akan membentuk suatu

³¹Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), 21.

keseimbangan dalam skala makro; dengan asumsi bahwa semua hal lain tetap sama.³²

Lebih lanjut dijelaskan tentang pengertian ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang dan jasa yang diperjual belikan.³³

Ekonomi mikro meneliti bagaimana berbagai keputusan dan perilaku penawaran dan permintaan atas barang dan jasa yang akan menentukan harga, dan bagaimana harga, pada gilirannya, menentukan penawaran, dan permintaan barang dan jasa selanjutnya. Individu yang melakukan kombinasi konsumsi atau produksi secara optimal, bersama individu lainya di pasar akan membentuk keseimbangan dalam skala makro dengan asumsi segala hal lain sama (*ceteris paribus*).³⁴

2. Ruang lingkup Usaha Mikro

Sebagaimana yang dijelaskan di atas tentang arti dari mikro yang berarti kecil. Bahasan pokok dalam mikro ekonomi adalah bagaimanakah menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimumkan. Hal ini dibuat berdsarkan pemikiran bahwa a) kebutuhan dan keinginan manusia tidak terbatas, b) kemampuan faktor-faktor produksi menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat adalah terbatas. Berdasarkan pemikiran ini mikro ekonomi bertitik tolak kepada pemisalan

³² http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_mikro , diakses pada tanggal 12 Oktober 2010

³³ <http://ekonomi.com/research>, di akses pada tanggal 12 Oktober 2010

³⁴ Ibid.

bahwa faktor-faktor produksi yang tersedia selalu sepenuhnya digunakan. Keadaan ini mendorong masyarakat untuk memikirkan cara yang paling efisien dalam menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia.³⁵

Dari uraian diatas ruang lingkup tentang mikro ekonomi adalah sebagai berikut:³⁶

a. Interaksi di pasar barang

Aspek yang pertama yang diterangkan oleh teori mikroekonomi adalah mengenai kegiatan suatu pasar barang, misalnya pasar kopi atau pasar karet. Dilihat dari pandangan mikroekonomi suatu perekonomian itu merupakan gabungan dari berbagai jenis pasar, termasuk pasar barang. Maka untuk mengenal corak kegiatan suatu perekonomian kita antara lain perlu memperhatikan corak operasi suatu pasar barang. Dalam teori ekonomi pasar adalah suatu institusi, yang pada umumnya tidak wujud secara fisik, yang mempertemukan penjual dan pembeli suatu barang.

b. Tingkah Laku Penjual dan Pembeli

Aspek berikut yang dianalisis teori mikroekonomi adalah tentang tingkah laku penjual dan pembeli di pasar. Dalam analisis ini, teori mikroekonomi bertitik tolak dari dua pemisalan. Pemisalan yang pertama adalah para pembeli dan penjual menjalankan kegiatan ekonomi secara rasional. Pemisalan kedua, para pembeli dan para penjual berusaha memaksimumkan keuntungan yang akan

³⁵Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi...*, 21

³⁶Ibid, 25

diperolehnya. Berdasarkan dua pemisalan tersebut maka 1) bagaimana seorang pembeli menggunakan sejumlah pendapatan atau uang untuk membeli berbagai jenis barang yang dibutuhkanya 2) bagaimana seorang penjual dan produsen menentukan tingkat produksi yang akan dilakukanya.

c. Interaksidi Pasaran Faktor

Aspek penting lain yang dianalisis teori mikroekonomi adalah interaksi penjual dan pembeli di pasaran faktor-faktor produksi. Individu dalam perekonomian adalah pemilik faktor-faktor produksi.

3. Ciri-ciri Usaha Mikro:³⁷

- a) Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti;
- b) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat;
- c) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha;
- d) Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai;
- e) Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah;
- f) Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank;
- g) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

³⁷Ibid.,30

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa usaha mikro merupakan usaha yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang masih sangat sederhana dan belum mengelola usahanya dengan sumberdaya manusia yang berkualitas. Dalam bidang administrasi usaha mikro juga masih sederhana dan pengusaha mikro pada umumnya belum memiliki izin usaha.